

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN**



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Penajam, 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Penajam, Januari 2018

KEPALA DINAS
PERTANIAN



Drs. Joko Dwi Fetrianto, MP

NIP. 19591010 198012 1 015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya disebut sebagai **IKU Dinas Pertanian** merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan *IKU Dinas Pertanian* Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

D. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Pertanian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

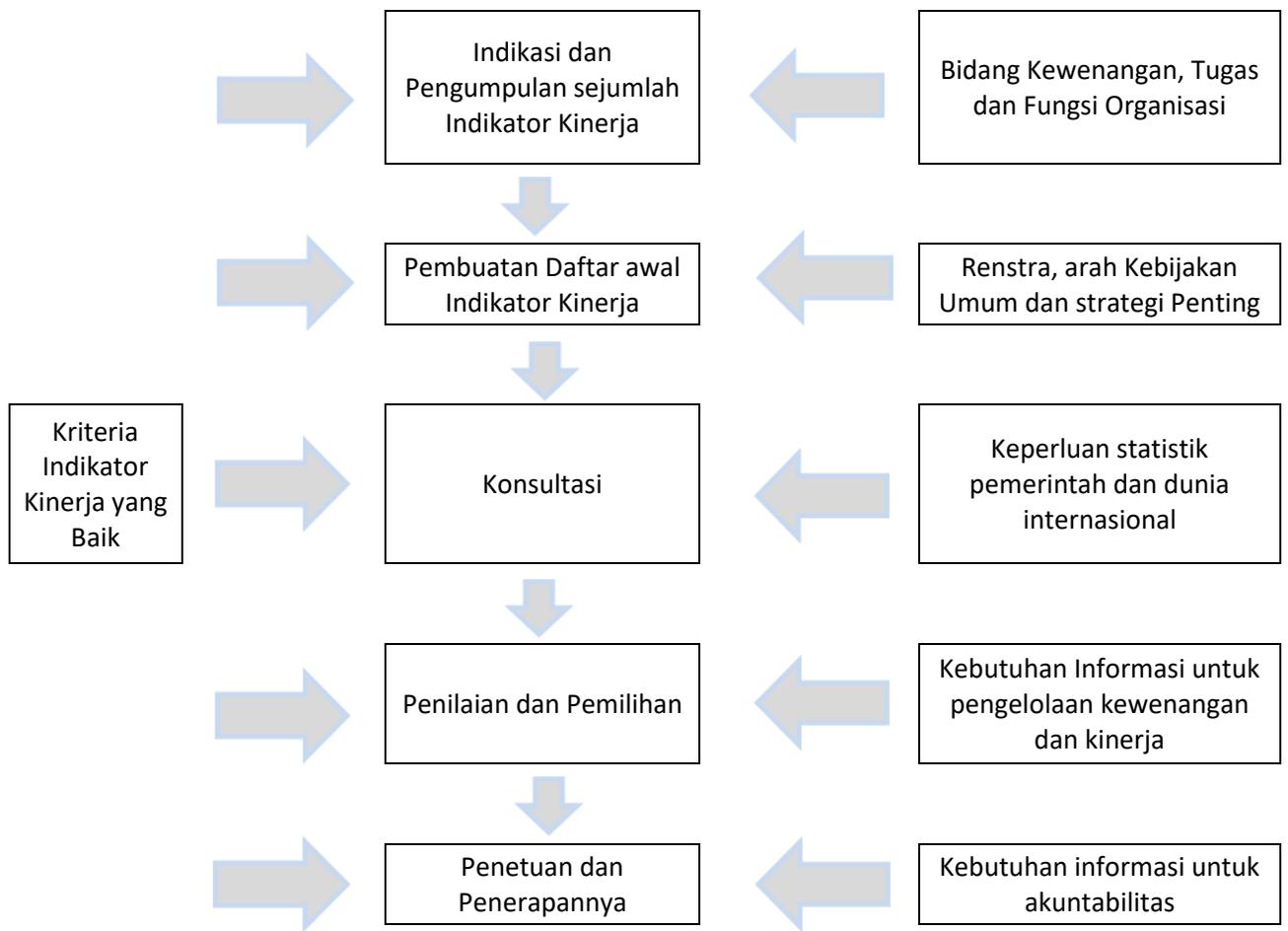
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang mejadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN

A. Visi dan Misi Dinas Pertanian

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu, ”
“Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dijabarkan dalam 10 Misi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara , yaitu:

1. Meningkatkan komitmen, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Pertanian
2. Mendayagunakan Lahan dan Air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan
3. Melibatkan Stakeholder dalam pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan
4. Mengembangkan kebijakan perlindungan lahan dan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani dipedesaan
5. Mewujudkan mekanisasi pertanian yang tangguh dan mandiri
6. Mengupayakan ketersediaan pupuk, obat dan pestisida yang berkelanjutan
7. Mengupayakan ketersediaan benih dan bibit yang bermutu dan berdaya saing
8. Menumbuh kembangkan penangkar benih dan bibit
9. Memfasilitasi akses permodalan usaha pertanian ke lembaga keuangan
10. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengembangan agroindustri (industri hilir) dibidang pertanian

Dengan mengacu pada visi, misi dan analisis isu strategis Dinas Pertanian yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2014 – 2018 adalah terwujudnya peningkatan produksi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2)

telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang Pertanian dan Peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pertanian dan peternakan
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Arah Kebijakan Umum.

Sesuai dengan rencana untuk mewujudkan "Kabupaten Penajam Sebagai Pusat Agribisnis dan Agroindustri yang berbasis pada Ekonomi Kerakyatan" di antaranya dengan pembangunan sector Pertanian, dan Peternakan, yang ditempuh dengan langkah-langkah pokok berikut:

- a. Peningkatan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, melalui program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Peningkatan Populasi dan produksi ternak melalui program pengembangan dan peningkatan produksi peternakan.
- c. Dukungan operasional rutin, melalui kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur, Penyelenggaraan administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Perencanaan evaluasi dan pelaporan internal OPD.

Dari beberapa point tahapan pembangunan/ perkembangan pertanian dalam arti luas di atas, kesemuanya bermuara kepada ekonomi kerakyatan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan misi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, dengan mengembangkan komoditas agribisnis.
- c. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan
- d. Meningkatkan kualitas lembaga dan sumberdaya manusia pertanian, peternakan dan perkebunan

maka sesuai sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pertanian Kabupaten Penajam paser Utara sebagai berikut :

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pertanian
2. Tugas : Merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama dalam tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara ini, didasarkan pada Misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Unit Organisasi : Dinas Pertanian
- 2 Tugas : Merumuskan Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Kegiatan Operasional di Bidang Pertanian Hortikultura Tanaman Pangan, Prasarana dan Sarana Pertanian serta
- 3 Fungsi :
 - 1 Merumuskan Kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan
 - 2 Menyelenggarakan urusan dan pelayanan bidang pertanian dan peternakan
 - 3 Pembinaan dan Pelaksanaan Monitoring bidang pertanian dan peternakan

No	Sasaran dan Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formula	Satuan	Alasan	Unit Terkait dan Sumber Data
1	Peningkatan Ketahanan Panganan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan peternakan	1. Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Mengukur Swasembada Tanaman Pangan	$\frac{\text{Produksi th(n)} - \text{th(n-1)}}{\text{Produksi th (n-1)}} \times 100 \%$	Ton	Mengukur Swasembada	Data Statistik, Bidang TPH Subbag Perencanaan Program
		Tanaman pangan dan hortikultura a. Tanaman Pangan - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Kacang Tanah - Kacang Hijau b. Hortikultura - Cabe besar - Jeruk - Jagung manis - Semangka				Tanaman Pangan	
		2 Peningkatan Produktivitas Tanaman pangan dan hortikultura	Mengukur keberhasilan peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produktivitas th(n)} - \text{th(n-1)}}{\text{Produktivitas th (n-1)}} \times 100 \%$	Ton	Mengukur keberhasilan peningkatan produksi tanaman pangan	Data Statistik Bidang TPH Subbag Perencanaan Program
		a Tanaman Pangan - Jagung - Kedelai - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Kacang tanah - Kacang hijau b Hortikultura - Cabe Besar					

No	Sasaran dan Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formula	Satuan	Alasan	Unit Terkait dan Sumber Data
		- Jeruk - Jagung manis - Semangka					
		3 Peningkatan Populasi peternakan	Menunjang pemenuhan protein hewani	$\frac{\text{Populasi th}(n)-(\text{th}(n-1))}{\text{Populasi th}(n-1)} \times 100 \%$	Ekor	Menunjang pemenuhan protein hewani	Data statistik dan bidang Peternakan
		- Sapi - Kambing - Ayam Buras - Ayam Ras					
		4 Peningkatan Produksi Peternakan		$\frac{\text{Produksi Peternakan th}(n)-(\text{th}(n-1))}{\text{Produksi th}(n-1)} \times 100 \%$			
		a Daging - Sapi - Kambing - Ayam	Menunjang pemenuhan protein hewani		Ton/kw	Menunjang pemenuhan protein hewani	Data statistik dan bidang peternakan
		b Telur - Ayam Ras - Ayam Buras - Itik	Menunjang pemenuhan protein hewani		Butir	Menunjang pemenuhan protein hewani	Data statistik dan bidang peternakan
5 Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan produksi Perkebunan	$\frac{\text{Produksi Perkebunan th}(n)-(\text{th}(n-1))}{\text{Produksi th}(n-1)} \times 100 \%$	Ton		Data Statistik		
6 Luas Areal Perkebunan		$\frac{\text{Luas Areal Perkebunan th}(n)-(\text{th}(n-1))}{\text{Luas Areal Perkebunan th}(n-1)} \times 100 \%$	Ha		Data Statistik		
2	Peningkatan kemandirian Desa	Peningkatan angka partisipasi masyarakat	Mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat	$\frac{\text{Partisipasi th}(n)-(\text{th}(n-1))}{\text{Partisipasi th}(n-1)} \times 100 \%$		Mengukur kesejahteraan	Bidang TPH. Saprasi

No	Sasaran dan Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formula	Satuan	Alasan	Unit Terkait dan Sumber Data
			yang mapan	Partisipasi th (n-1)	%	ekonomi masyarakat yang mapan	ternak
3	Mewujudkan diterapkan prinsip - prinsip good governance pada pada semua tingkatan pemerintahan	<p>1 Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana aparatur</p> <p>2 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>3 Ketepatan Laporan Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>4 Penyelesaian Kegiatan Sesuai waktu dan Mutu yang direncanakan</p>	<p>Menunjang Pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif</p> <p>Menunjang Pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif</p> <p>Mengukur Kinerja organisasi dalam penyampaian laporan (Lakip)</p> <p>Mengukur Kinerja organisasi dalam penyampaian laporan (Lakip)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Saprash th(n)-(th(n-1))}}{\text{Jumlah Saprash th (n-1)}} \times 100 \%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Saprash th(n)-(th(n-1))}}{\text{Jumlah Saprash th (n-1)}} \times 100 \%$</p> <p>$\frac{\text{Laporan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah laporan seharusnya terkumpul}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Kegiatan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>Menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif</p> <p>Menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif</p> <p>Mengukur Kinerja organisasi dalam penyampaian laporan (Lakip)</p> <p>Mengukur Kinerja organisasi dalam penyampaian laporan (Lakip)</p>	<p>Sekretaris Dinas, Kasubag Umum, Bend. Barang</p> <p>Sekretaris Dinas, Kasubag Umum, Bend. Barang</p> <p>Sekretaris Dinas, Kasubag Keuangan, Bend. Pengeluaran, PPTK, Perencanaan Program</p> <p>Sekretaris Dinas, Kasubag Keuangan, Bend. Pengeluaran, PPTK, Perencanaan Program</p>